



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**SABTU, 10 NOVEMBER 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Pegawai DPPKA Kembalikan Rp 400 Juta**

**BENGKULU, BE** - Aparatur sipil negara (ASN) dan honorer Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan Aset Daerah (DPPKA) Kota Bengkulu, yang menerima kelebihan bayar tunjangan dana Beban Kerja (BK) yang dibayarkan pada 2015. Pada awal November 2018 ini, telah mengembalikan uang BK yang mereka terima kepada penyidik. Ada sekitar 123 ASN dan honorer yang mengembalikan kerugian negara dari dugaan penyimpangan dana BK itu. Dengan nominal uang yang dikembalikan sekitar Rp 400 juta.

Kajari Bengkulu Emilwan Ridwan SH MH melalui Kepala Seksi Pudana Khusus (Kasi Pidsus) Oktalian Darmawan

SH kepada BE kemarin (9/11) menuturkan, "Kelebihan bayar sudah dikembalikan seluruhnya oleh ASN dan honorer totalnya sekitar Rp 400 juta."

Dengan demikian, kerugian negara (KN) dalam kasus tunjangan dana BK ini masih tersisa Rp 1,1 miliar lebih. Pengembalian sisa kerugian negara yang belum dikembalikan tersebut, dibebankan kepada empat orang tersangka, yang saat ini berkasnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu. Dengan demikian, Kejari hanya tinggal menunggu penetapan waktu sidang.

"Hari ini kita limpahkan ke pengadilan," imbuh Kasi Pidsus.

Kasus dugaan korupsi tunjangan dana BK sudah menyeret 4 tersangka, M Sofyan mantan Kadis DPPKA Kota Bengkulu, mantan Kabid Perbendaharaan DPPKA Ikhsanul Arifin, Kasi Verifikasi Emiyati dan Bendahara Yulian Firdaus. Totak kerugian negara pada kasus korupsi ini mencapai Rp 1,5 miliar dari anggaran Rp 5 miliar.

Diduga pembayaran tunjangan dana BK tahun 2015 menyalahi aturan Peraturan Walikota (Perwal) nomor 36. Karena pada 2014. Sesuai dengan perwal nomor 12 jabatan Kadis mendapatkan tunjangan dana BK Rp 6,5 juta, sementara pada Perwal Nomor 36 tahun 2015 menjadi Rp 12 juta. Jabatan seker-

taris dan Kabid pada tahun 2014 mendapatkan tunjangan dana BK Rp 5 juta sementara pada 2015 menjadi Rp 9 juta. Jabatan Kasi pada 2014 mendapat tunjangan dana BK Rp 3 juta sementara pada 2015 mendapatkan Rp 5 juta.

Jabatan bendahara dari Rp 3 juta pada 2014 naik menjadi Rp 4,5 juta pada 2015.

Staf ASN dari Rp 1,5 juta pada 2014 menjadi Rp 3,5 juta ditahun 2015. Termasuk juga honorer dari Rp 1 juta pada 2014 mendapatkan Rp 3 juta pada 2015. Uang yang harus dikembalikan ASN dan honorer dari dana BK yang diterima selisih kenaikan tunjangan dana BK dari 2014 ke 2015 dikalikan dua bulan. (167)